

ABSTRAKSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA DALAM
PENYELENGGARAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA
(Studi Kasus pada PT. Jamsostek (Persero) Kantor cabang Surakarta)**



Disusun oleh :

DODDY SURYONO

C 100 010 232

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2007**

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (Studi Kasus pada PT. Jamsostek (Persero) Kantor cabang Surakarta)

Pembimbing I

Pembimbing II

(M. Sandjaja, SH)

(Inayah, SH)

Mengetahui Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH., M. Hum)

ABSTRAKSI

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bahan dari upaya pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian tak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur baik materiil maupun spiritual. Peran serta ketenagakerjaan dalam pembangunan nasional sendiri meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktifitas nasional.

Peran serta ketenagakerjaan dalam pembangunan nasional sendiri meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktifitas nasional.

Jaminan sosial tenaga kerja mempunyai aspek antara lain :

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

Tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaannya tanpa suatu perkiraan yang pasti dapat mengalami kecelakaan kerja maupun penyakit akibat bekerja. Dimana kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja dapat menimbulkan kerugian baik individual tenaga kerja maupun perusahaan untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruhnya penghasilan yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Sehingga diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberian perlindungan hukum bagi peserta dalam penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja pada PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Surakarta?
2. Hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam pemberian perlindungan hukum bagi peserta dalam penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjawab permasalahan yang dimunculkan dalam perumusan masalah di depan yakni : Mengetahui pemberian perlindungan hukum bagi peserta dalam penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja, Mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi pada pemberian perlindungan hukum tersebut, menambah dan memperluas pengetahuan serta pemahaman tentang aspek-aspek hukum sebagai suatu teori dan prakteknya terutama di bidang hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis kemukakan, adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Bagi Penulis: Agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam mengetahui perlindungan hukum bagi peserta tentang kecelakaan kerja PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Surakarta serta mengetahui bagaimana pemberian perlindungan hukum bagi peserta.
2. Bagi Pembaca: Agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dalam mengetahui norma yang mengatur tentang jaminan kecelakaan kerja PT. Jamsosotek (persero) Cabang Surakarta serta mengetahui bagaimana perlindungan hukumnya.
3. Bagi Perusahaan: Dapat memberikan masukan, manfaat kepada pihak PT. Jamsostek (Persero) Cabang Surakarta dalam upaya meningkatkan perlindungan bagi peserta atas penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja.

E. Pengertian Asuransi

Menurut pengertian yuridis yang terdapat dalam pasal 246 KUHD berbunyi sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dimana penanggung mengikat diri tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti”.

Sedangkan menurut keterangan pasal 1 angka (1) UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian memberikan pengertian :

“Asuransi/pertanggungan adalah perjanjian antara 2 pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memberi premi asuransi untuk memberikan pengganti kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Pokok-pokok pengaturan asuransi dalam KUHD terdapat dalam buku I bab 9 dan 10 serta buku II bab 9 dan 10. Buku I bab 9 mengatur tentang asuransi pada umumnya, buku I bab 10 mengatur tentang asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian dan asuransi jiwa. Sedangkan buku II bab 9 mengatur tentang asuransi laut dan perbudakan, buku II bab 10 mengatur tentang asuransi pengangkutan di darat dan di sungai-sungai serta perairan pedalaman.

Walaupun pokok-pokok pengaturan asuransi terdapat dalam KUHD, namun dasar hukum asuransi itu sendiri terdapat dalam pasal 1774 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah perjanjian asuransi; bunga cagak hidup; perjudian dan pertaruhan. Perjanjian yang pertama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang”.

Dalam ketentuan pasal 1774 KUH Perdata yang sudah dikemukakan terdahulu antara lain disebutkan bahwa perihal asuransi akan diatur dalam KUHD. Oleh sebab itu untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan asuransi dapat dilihat dalam pasal 246 KUHD yang menentukan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam asuransi terdapat 4 unsur yaitu adanya suatu perjanjian, premi, adanya ganti rugi dan adanya suatu peristiwa yang tak tertentu. Adanya suatu premi dalam asuransi sebagai suatu perjanjian dapat berlaku ketentuan-ketentuan dalam buku II KUH Perdata.

Perasuransian selain terdapat pengaturannya dalam KUH Perdata dan KUHD juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya adalah:

- a. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, ditetapkan tanggal 11 Februari 1992.
- b. UU No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
- c. UU. No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan.
- d. PP No. 17 tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
- e. PP No. 18 tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan.

F. Pengertian Asuransi Sosial

Didalam keterangan umum UU Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, pada butir ke-3 menyatakan bahwa program asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu UU dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu asuransi sosial mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Asuransi tersebut biasanya diselenggarakan oleh pemerintah melalui pemerintah bertindak sebagai penanggung.
- b. Dalam hubungan hukum asuransi bersifat wajib bagi seluruh anggota masyarakat tertentu.
- c. Dalam penentuan penggantian kerugian sudah ditetapkan sebelumnya dan diatur oleh pemerintah melalui peraturan perundangan.
- d. Tujuan adalah untuk memberikan suatu jaminan sosial dan bukan untuk mencari keuntungan semata serta pencapaian tujuan tersebut sudah merupakan kewajiban pemerintah.

Dalam asuransi sosial keikutsertaan dalam asuransi tersebut terdapat unsur paksaan atau wajib menjadi anggota asuransi tersebut. Dengan menyadari besarnya manfaat asuransi bagi masyarakat, maka pemerintah telah menyelenggarakan pemberian jaminan sosial bagi anggota masyarakat tertentu melalui asuransi dengan memberikan beberapa asuransi sosial, seperti: TASPEN, ASABRI, ASKES, JAMSOSTEK.

G. Pengertian Jamsostek

Menurut Senjun H. Manulang dalam bukunya yang berjudul pokok-pokok ketenagakerjaan Indonesia, yang dimaksud dengan jaminan sosial tenaga kerja adalah sebagai berikut :

“Jaminan sosial tenaga kerja adalah jaminan yang menjadi hak tenaga kerja berbentuk tunjangan berupa uang, pelayanan dan pengobatan yang merupakan pengganti penghasilan uang yang hilang atau kurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, meninggal dunia dan menganggur”.

Sedang pengertian jaminan sosial tenaga kerja menurut UU Nomor 3 tahun 1992 dalam pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa:

“Jaminan sosial tenaga kerja suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, bersalin, hari tua, meninggal dunia”.

Adapun dasar hukum penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja adalah sebagai berikut:

- a. UU Nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja.

- b. Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja.
- c. Keputusan Presiden RI nomor 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja.
- d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor Per.05/MEN/1993 tentang petunjuk teknis, pendaftaran, kepesertaan, pembayaran iuran, pembayaran santunan dan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja.
- e. PP nomor 36 tahun 1995 tentang penetapan badan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja.

H. Program-program Jamsostek dan Pembayaran Preminya

Adapun ruang lingkup program jamsostek tercantum di dalam pasal 6 ayat (1) UU Nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Yang dimaksud dengan jaminan kecelakaan kerja adalah kecelakaan kerja yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa dilaluinya, serta kecelakaan yang terjadi di tempat lain sepanjang perjalanan tersebut dalam hal keperluan dinas dan disertai dengan surat jalan atau surat dinas yang sah dari perusahaan.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan santunan yang berupa uang sebagai pengganti biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, biaya pengobatan dan atau perawatan, biaya rehabilitasi serta santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat sebagian atau selamanya baik fisik maupun mental, santunan kematian sebagai peristiwa beberapa kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja meliputi:

- 1) Kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja/lingkungan tempat kerja.
- 2) Kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dan pulang ke rumah dari tempat kerja, sepanjang melalui perjalanan yang wajar dan biasa dilalui setiap hari.
- 3) Kecelakaan kerja di tempat lain dalam rangka tugas atau secara langsung bersangkutan paut dengan penugasan dan tidak ada unsur kepentingan pribadi.
- 4) Penyakit yang timbul karena hubungan kerja.

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas jaminan kecelakaan kerja berupa penggantian biaya yang meliputi :

- 1) Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan atau kirimnya, termasuk biaya P3K.
- 2) Biaya pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan selama di rumah sakit, termasuk rawat jalan.

- 3) Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan atau alat ganti (*prothese*) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja (pasal 12 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1993).

Disamping itu, diberikan juga santunan yang berupa yang meliputi:

- 1) Santunan sementara tidak mampu bekerja.
- 2) Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya.
- 3) Santunan cacat total untuk selama-lamanya, baik fisik maupun mental.
- 4) Santunan kematian.

Biaya pengangkutan ke rumah sakit atau kerumahnya dan biaya pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan selama di rumah sakit dibayar lebih dahulu oleh pengusaha (pasal 12 ayat (2) dan pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1993). Dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1993 juga telah disebutkan besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja yang dibedakan dalam 5 kelompok sesuai dengan jenis usaha, yaitu:

- 2) Kelompok I = 0,24% dari upah sebulan.
- 3) Kelompok II = 0,54% dari upah sebulan.
- 4) Kelompok III = 0,89% dari upah sebulan.
- 5) Kelompok IV = 1,27% dari upah sebulan.
- 6) Kelompok V = 1,74% dari upah sebulan.

Iuran tersebut diatas ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha. Sebagai contoh, suatu perusahaan yang termasuk dalam kelompok II pembayaran upah pada tenaga kerja sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan. Maka perusahaan tersebut harus membayar jaminan kecelakaan sebesar =
 $0,54\% \times \text{Rp. } 2.000.000,- = \text{Rp. } 10.800,-$

b. Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan kematian (JKM) adalah santunan berupa uang tunai dan santunan berupa uang pengganti biaya pemakaman, seperti pembelian tanah, peti jenazah, kain kafan, transportasi dan lain-lain yang berkaitan dengan tata cara pemakaman sesuai dengan adat-istiadat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta kondisi daerah masing-masing dari lembaga yang bersangkutan.

Jaminan kematian dibayar sekaligus kepada janda atau duda atau anak yang meliputi:

- 1) Santunan kematian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 2) Biaya pemakaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Jaminan janda atau duda atau anak tidak ada, jaminan kematian dibayarkan sekaligus kepada keturunan sedarah yang ada di tenaga kerja menurut garis lurus ke bawah dan garis lurus keatas dihitung sampai derajat ke dua. Jika keturunan sedarah ini juga tidak ada, jaminan kematian dibayarkan sekaligus kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya jika tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan

kepada pengusaha atau pihak lain guna pengurusan pemakaman (pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1993). Urutan penerimaan yang diutamakan dalam pembayaran santunan kematian adalah:

- 1) Janda atau duda
- 2) Anak
- 3) Orangtua
- 4) Cucu
- 5) Kakak atau nenek
- 6) Saudara kandung
- 7) Mertua

Besarnya iuran jaminan kematian adalah sebesar 0,30% dari upah sebulan yang ditanggung pengusaha. Contoh : seorang tenaga kerja mempunyai upah Rp. 2.000.000,- = Rp. 6.000,- per bulan. Maka iuran kematian yang harus dibayarkan adalah sebesar =

$$0,30\% \times \text{Rp. 2.000.000,-} = \text{Rp. 6.000,-}$$

c. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan ini dimaksudkan untuk memberikan bekal bagi tenaga kerja setelah purna kerja sehingga dapat memberikan bekal bagi hidupnya. Jaminan ini diberikan kepada tenaga kerja yang telah berusia 55 tahun atau yang cacat total setelah ditetapkan oleh dokter secara sekaligus atau sebagian dan berkala kepada tenaga kerja.

Jaminan hari tua pada pokoknya termasuk dalam jenis program pensiun iuran pasti, dimana besarnya iuran telah ditentukan secara pasti dalam ketentuan yang mengaturnya (dalam hal ini Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1993). Jaminan hari tua ditanggung bersama antara pengusaha dengan tenaga kerja.

Pengusaha menanggung 3,70% dari upah sebulan, sedangkan pekerja menanggung 2% dari upah sebulan, sehingga total dari jaminan hari tua sebesar 5,70% dari upah sebulan. Contoh: Apabila seseorang pekerja mempunyai upah sebesar Rp. 2.000.000 dalam satu bulan maka iuran yang harus dibayarkan adalah:

$$5,70\% \times \text{Rp. 2.000.000,-} = \text{Rp. 114.000,-}$$

yang dibayar tenaga kerja adalah :

$$2\% \times \text{Rp. 114.000,-} = \text{Rp. 2.280,-}$$

yang dibayar perusahaan adalah :

$$3,70\% \times \text{Rp. 114.000,-} = \text{Rp. 4.218,-}$$

Badan penyelenggara (PT. Jamsostek) menetapkan besarnya jaminan hari tua sebagai berikut:

1. Secara sekaligus apabila jumlah seluruh jaminan hari tua yang harus dibayar kurang dari Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
2. Secara berkala apabila jumlah seluruh jaminan hari tua mencapai Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan dilaksanakan paling lama 5 tahun.

Pembayaran jaminan hari tua secara berkala tersebut dilaksanakan berdasarkan pilihan tenaga kerja yang bersangkutan (pasal 24 peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1993).

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) adalah berupa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada tenaga kerja atau suami atau istri yang sah dan anak yang bersifat menyeluruh dan meliputi pelayanan peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta pemulihan kesehatan.

Dalam pasal 16 ayat (1) UU Nomor 3 tahun 1992 ditugaskan bahwa yang berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan adalah:

- 1) Tenaga kerja
- 2) Suami/istri
- 3) Anak

Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1993 menegaskan bahwa anak yang berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) sebanyak-banyaknya 3 orang.

Besarnya jaminan pemeliharaan kesehatan ini dibedakan antara tenaga kerja yang masih bujang dengan yang telah berkeluarga. Untuk tenaga kerja yang masih bujang sebesar 3% dari upah sebulan sedang yang telah berkeluarga sebesar 6% dari upah sebulan. Iuran jaminan pemeliharaan kesehatan ditanggung oleh pengusaha. Contoh: seorang tenaga kerja mempunyai upah sebesar Rp. 2.000.000,- maka jaminan kesehatan yang harus dibayar adalah:

- Bujang
 $3\% \times \text{Rp. } 2.000.000,- = \text{Rp. } 60.000,-$
- Telah berkeluarga
 $6\% \times \text{Rp. } 2.000.000,- = \text{Rp. } 120.000,-$

I. Kepesertaan Jamsostek

Prosedur pendaftaran kepesertaan dalam program jamsostek tercantum dalam pasal 2,3 dan 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor : Per-05/men/1993 tentang petunjuk teknis pendaftaran, kepesertaan, pembayaran iuran, pembayaran santunan dan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja, yaitu:

- a. Pengusaha mengisi dan menyampaikan pendaftaran perusahaan (formulir jamsostek 1) dan pendaftaran tenaga kerja (formulir jamsostek 1a) pada PT. Jamsostek setempat selambat-lambatnya 30 hari sejak diterima formulir tersebut.
- b. Kepesertaan dimulai tanggal 1 bulan berikutnya sejak formulir jamsostek 1 dan 1a diterima oleh PT. jamsostek setempat serta formulir daftar susunan keluarga tenaga kerja (formulir b). Bagi perusahaan yang ikut serta dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan.

- c. PT. Jamsostek setempat menentukan tarif iuran jaminan kecelakaan kerja untuk perusahaan yang bersangkutan.
- d. PT. Jamsostek menerbitkan sertifikat kepesertaan, kartu peserta dan kartu pemeliharaan kesehatan paling lama 7 hari setelah formulir pendaftaran iuran diterima lengkap dari perusahaan dan telah membayar iuran pertama.
- e. Pengusaha wajib melaporkan kepada PT. Jamsostek setempat apabila terjadi:
 1. Penambahan tenaga kerja dengan mengisi formulir jamsostek 1a.
 2. Pengurangan tenaga kerja dengan mengisi formulir 1c.
 3. Perubahan susunan keluarga dengan mengisi formulir 1b.

J. Hak-hak Tenaga Kerja yang Berhubungan dengan Kecelakaan Kerja

Adanya hubungan kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara keduanya, yang menjadi hak-hak tenaga kerja adalah bahwa tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Maksudnya agar tenaga kerja terjamin keamanannya di dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas nasional, maka tenaga kerja dilindungi dari berbagai persoalan di sekitarnya yang dapat mengganggu dalam melaksanakan pekerjaannya. Dalam hal keselamatan tenaga kerja meliputi semua yang bertalian dengan sarana, lingkungan dan cara-cara melakukan pekerjaan.

Dalam hal kecelakaan kerja yang menimpa terhadap tenaga kerja, pengusaha harus mengajukan klaim kepada PT. Jamsostek dan wajib melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi atau menimpa tenaga kerja ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kodya Surakarta dan PT. Jamsostek kantor cabang Surakarta.

K. Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Peserta Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan Nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan. Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang bersifat dasar dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945.

A. Tujuan pemberian perlindungan hukum bagi tenaga kerja, yaitu:

1. Memberikan ketenangan kerja bagi karyawan yang merupakan pelaksana pembangunan melalui perlindungan terhadap terganggunya arus penerimaan penghasilan
2. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya
3. Sebagai penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

B. Hak yang diperoleh tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja, Jaminan yang diberikan tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja, dalam PP nomor 4 Tahun 1993 adalah meliputi:

1. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan
2. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan selama di rumah sakit termasuk rawat jalan
3. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan alat ganti (*porthese*) bagi tenaga kerja yang anggota badannya tidak berfungsi atau hilang akibat kecelakaan kerja
2. Selain pengganti biaya sebagaimana disebutkan diatas kepada tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja diberikan juga santunan berupa uang yang meliputi:
 - a. Santunan sementara tidak mampu bekerja
 - b. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
 - c. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental
 - d. Santunan Kematian.

Setiap kecelakaan kerja yang terjadi, perusahaan tempat tenaga kerja bekerja wajib melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan PT. Jamsostek (Persero) setempat.

1. Penggantian biaya atau jaminan kecelakaan kerja meliputi:
 - a. Ongkos pengangkutan tenaga kerja ke rumah sakit sebagai berikut:
 - 1) Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan darat atau sungai maksimum sebesar Rp. 150.000,-
 - 2) Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimum sebesar Rp. 300.000,-
 - 3) Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimum sebesar Rp. 400.000,-
 - b. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan meliputi:
 - 1) Dokter

- 2) Obat
- 3) Operasi
- 4) Rontgen
- 5) Laboratorium
- 6) Perawatan
- 7) Puskesmas
- 8) Rumah Sakit Umum Pemerintah kelas I
- 9) Gigi
- 10) Mata, dan
- 11) Jasa tabib atau sinthe atau tradisisonal yang telah mendapat izin resmi dari instansi yang berwenang.

Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk satu peristiwa kecelakaan tersebut dibayarkan sesuai bukti-bukti pengeluaran dan maksimum sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) per kasus.

Apabila dalam satu kasus, uang ganti rugi tidak terpakai semuanya maka sisa uang tersebut tidak masuk keperusahaan atau tenaga kerja tetapi kembali kebadan pelaksana yaitu JAMSOSTEK. Dan apabila uang ganti rugi yang telah ditetapkan oleh pihak Jamsostek sebesar Rp. 6.400.000,- mengalami kekurangan maka biaya tersebut ditanggung oleh pihak perusahaan di mana pekerja itu bekerja.

- c. Penggantian pembelian alat Bantu (*orthose*) dan atau alat pengganti (*prothese*) diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan ketentuan maksimum 140% dari harga yang berlaku pada RS. Suharso, Solo.
2. Santunan yang berupa uang meliputi:
 - a. Santuan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
 - 1) 4 bulan pertama 100% x upah sebulan
 - 2) 4 bulan kedua 75x % upah sebulan, dan
 - 3) Bulan seterusnya 50x % upah sebulan.
 - b. Santunan cacat
 - 1) Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) dengan besarnya prosentase (%) sesuai tabel x 70 bulan upah.
 - 2) Santunan cacat total untuk selam-lamanya dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah:
 - (a) Santunan berkala sebesar 70%x 70 bulan upah
 - (b) Santunan berkala sebesar Rp. 50.000,- selama 24 bulan
 - (c) Santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) dengan besarnya santunan adalah % berkurangnya fungsi x % sesuai table x 70 bulan upah.
 - 3) Santunan kematian dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah:
 - (a) Santunan sekaligus sebesar %60 x 70 bulan upah

(b) Santunan berkala sebesar Rp. 50.000,- selama 24 bulan

(c) Biaya pemakaman Rp. 1.000.000,-

Selama tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan tersebut masih belum mampu bekerja, pengusaha tetap membayar upah tenaga kerja yang bersangkutan, sampai penetapan akibat kecelakaan kerja yang dialami diterima semua pihak atau dilakukan oleh menteri. Selanjutnya badan penyelenggara mengganti santunan sementara tidak mampu bekerja kepada pengusaha yang membayar upah tenaga kerja sebagaimana disebutkan diatas. Sementara itu, didalam hal santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara lebih besar dari yang dibayarkan oleh pengusaha, maka selisihnya dibayarkan langsung kepada tenaga kerja. Jika lebih kecil dari upah yang telah dibayarkan oleh pengusaha, maka selisihnya tidak dimintakan pengembaliannya kepada tenaga kerja.

C. Sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja

Jaminan sosial tenaga kerja pada hakekatnya adalah program yang bersifat wajib secara Nasional, sehingga termasuk hukum publik yang mengatur sanksi pidana bagi yang melanggar. Ancaman hukuman terdiri dari:

1. Ketentuan pidana yaitu:

- a. Hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Pengulangan tindak pidana untuk kedua kalinya atau lebih dihukum pidana kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan.

Ketentuan pidana ini berlaku terutama untuk pelanggaran yang berkaitan dengan masalah kepesertaan, iuran dan pelaporan.

2. Sanksi administratif berupa:

- a. Ganti rugi
- b. Denda

Hukuman administrasi ini berlaku terhadap pelanggaran yang menyangkut keterlambatan pembayaran iuran atau jaminan dan kekurangan pembayaran jaminan. Dalam hal ini PT. Jamsostek , tidak mempunyai hak atau wewenang untuk memberikan sanksi kepada suatu perusahaan yang lalai dalam memberikan jaminan kepada tenaga kerja tetapi PT. Jamsostek (Persero) berkoordinasi dengan DISNAKER beserta pejabat pengadilan (jaksa penuntut umum dan hakim) yang akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang lalai.

L. Hambatan-hambatan yang Terjadi Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Peserta dalam Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja

Pelaksanaan penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja pada PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Surakarta diharapkan dapat berjalan dengan lancar, namun pada kenyataannya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi yang secara langsung dapat mempengaruhi kelancaran pemberian perlindungan bagi peserta.

Hambatan-hambatan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja pada PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Surakarta adalah perusahaan yang mengajukan klaim belum tahu mekanisme, syarat-syarat administrasi, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dan dilampirkan belum lengkap, terlambat atau lainnya perusahaan dalam menyetor iuran kepada badan pengelola, pengajuan yang tidak diteruskan akan menghambat kelancaran proses penyelesaian dan pembayaran klaim oleh PT. Jamsostek sehingga semua menjadi tertunda atau belum dapat diproses dan terjadi penumpukan klaim-klaim.

Adapun beberapa faktor hambatan yang sering dialami oleh pihak PT. Jamsostek Kantor Cabang Surakarta yang mempengaruhi pemberian perlindungan hukum bagi peserta, adalah:

1. Dalam hal pengisian dan pengiriman formulir jamsostek 3 dan formulir jamsostek 3a melebihi batas waktu yang telah ditetapkan 2x24 jam, bahkan keterlambatan bisa sampai melebihi batas waktu kelonggaran yang diberikan. Untuk mengatasi masalah PT. Jamsostek Kantor Cabang Surakarta telah melakukan usaha dengan cara memberikan kelonggaran paling lama 1 minggu untuk lokasi yang dapat ditempuh dalam waktu 2x24 jam, sedangkan untuk daerah yang tidak dapat ditempuh dalam waktu 2x24 jam diberi batas waktu paling lama 2 minggu. Meskipun demikian dalam praktek sering dilanggar, disamping itu dalam hal pengisian tanggal kecelakaan, tanggal kerja kembali dalam formulir jamsostek 3 dan 3b tidak sama. Akibatnya formulir akan dikembalikan untuk diperbaiki sehingga dalam prosesnya akan memakan waktu yang sangat lama dan juga dapat menghalangi pengurusan selanjutnya.
2. Tidak adanya kelengkapan formulir jamsostek 3b dan 3c karena pengobatan atau perawatan dilaksanakan oleh dukun, sinthe, dan akupunktur (pengobatan tradisional). Dalam hal ini PT. Jamsostek Kantor Cabang Surakarta dapat memberikan pembayaran santunan kecelakaan kerja, sesuai dengan keterangan yang berlaku, yaitu:
 - a. Bila ada surat pengantar dari dokter yang merawat pertama kali
 - b. Bila di daerah tersebut tidak dijumpai dokter sama sekali
 - c. Bila sinthe atau dukun berijazah dan mempunyai ijin praktek dari instansi yang berwenang.
3. Formulir jamsostek 3 dan formulir jamsostek 3b data pendukungnya tidak ada, misalnya kwitansi, KPJ (Kartu Peserta Jamsostek) hilang, formulir

tahap III dari dokter yang menyatakan sembuh atau dirawat tidak ada. Hal ini oleh pihak PT. Jamsostek kantor cabang Surakarta diselesaikan dengan diadakan pemberitahuan kepadaperusahaan agar segera melengkapi data pendukungnya, dengan dilampirkan surat pernyataan dan diberi batas waktu penerimaan jawaban dari perusahaan selama 4 (empat) minggu.

4. Dalam hal dirawat 2 kali untuk pengajuan permintaan jaminan kecelakaan kerja tidak dilampirkan surat konsultasi dokter dan akibatnya dalam pengisian formulir jamsostek 3 tertulis di Rumah Sakit A tetapi pada formulir 3b tertulis di Rumah Sakit B, sehingga keadaan tersebut dianggap tidak benar dan harus diteliti secara khusus yang membutuhkan waktu yang lama.
5. Penderita atau tenaga kerja belum sembuh dan masih diharuskan berobat jalan tetapi sudah diajukan formulir 3b sehingga formulir tersebut harus dikembalikan kepada perusahaan. Dalam formulir jamsostek 3b sering tidak diberikan keterangan cacat, padahal sebenarnya sipenderita mengalami cacat sebagian sehingga santunan untuk itu tidak dapat diberikan.
6. Dalam kasus kecelakaan kerja lalulintas yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian dimana surat keterangan tersebut merupakan data pendukung didalam formulir jamsostek 3. Dalam hal ini santunan dapat diberikan sepanjang kasus kecelakaan tersebut tidak menimbulkan permasalahan,cukup dilengkapi dengan surat pernyataan kesaksian yang diketahui oleh pimpinan perusahaan.
7. Jika kecelakaan kerja tersebut mengakibatkan tenaga kerja meninggal dunia dan ahli waris tidak mengerti prosedur dan prasyarat yang harus dilengkapi sehingga dalam permintaan tunjangan data pendukung untuk melengkapi jelas membutuhkan waktu banyak sekali data yang harus dilampirkan.
8. Selain hambatan yang telah disebutkan diatas, iuran yang mengalami penunggakan juga merupakan penghambat, dan ini akan diperhitungkan sebagai utang perusahaan.

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan diatas mengenai hambatan yang dihadapi PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Surakarta melakukan upaya – upaya untuk mengatasi hambatan tersebut sehingga dalam pelaksanaan program Jamsostek dapat berjalan lancar. Berkaitan dengan masalah - masalah yang dihadapi dalam program tersebut, informan menegaskan bahwa:

“Kita selalu mengadakan komunikasi kepada mitra kerja, contohnya: bilamana ada perusahaan yang tenaga kerjanya mengalami kecelakaan kerja pada saat mereka memberitahukan lewat telepon kita juga menanyakan apakah syarat – syarat pengajuannya sudah tahu apa belum, seta bila ada syarat – syarat yang masih kurang kita beritahukan

kepada mereka lewat telepon atau bias langsung”. (Sumber: Customer Service)

Dalam menghadapi hambatan yang terjadi beberapa informan tersebut menyatakan bahwa PT. Jamsostek (Persero) melakukan upaya seperti:

- a. Memberikan penyuluhan kepada perusahaan saat pertama kali akan melakukan pendaftaran kepesertaan.
- b. Menyediakan brosur – brosur mengenai program Jamsostek.
- c. Memberikan Undang – undang dan Peraturan Pemerintah mengenai program Jamsostek kepada perusahaan.
- d. Menyediakan checklist data pendukung pegajuan klaim jaminan kecelakaan kerja.

M. Kesimpulan

Pada penelitian ini telah diutarakan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum dan hambatan pemberian perlindungan hukum bagi peserta dalam penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja pada PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Surakarta.

Maka disini akan dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pemberian perlindungan hukum bagi peserta dalam program Jamsostek bertujuan untuk memberikan ketenangan kerja bagi karyawan yang merupakan pelaksana pembangunan melalui perlindungan terhadap terganggunya arus penerimaan penghasilan, memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya, serta sebagai penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk perusahaan tempat mereka bekerja. Dengan tujuan yang demikian tenaga kerja perlu diberi perlindungan dalam bentuk perlindungan itu sendiri, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan, hal tersebut sangat dibutuhkan oleh tenaga kerja untuk menghadapi tantangan dan risiko yang terjadi dalam bekerja sebagai karyawan disuatu perusahaan. Setiap tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja dan perusahaan wajib untuk melaporkan setiap kecelakaan kerja yang terjadi pada tenaga kerjanya kepada Dinas Tenaga Kerja dan PT. Jamsostek (Persero) setempat.
2. Bahwa hambatan yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum bagi peserta dalam penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja pada PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Surakarta adalah perusahaan yang mengajukan klaim banyak yang belum mengetahui mekanisme, syarat – syarat administrasi, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dan syaarat yang dilampirkan belum lengkap, terlambat atau lalainya perusahaan dalam menyetorkan iuran kepada badan pengelola, pengajuan yang tidak diteruskan oleh perusahaan yang bersangkutan dan akan menghambat

kelancaran proses penyelesaian dan pembayaran klaim oleh PT. Jamsostek sehingga terjadi penumpukan klaim - klaim.

N. Saran

Sebagai penutup uraian diatas, maka penulis iangin memberikan beberapa saran yang erat hubungannya dengan penelitian ini, yang akan menjadi pertimbangan dalam upaya peningkatan perlindungan hukum PT. Jamsostek kepada para pesertanya. Saran – saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja tidak sedikit perusahaan yang belum mengetahui mekanisme dan syarat administrasi apa saja yang harus dipenuhi. Untuk itu perlu adanya penyuluhan tentang peraturan petunjuk teknis mengenai program Jamsostek kepada peserta yang masih aktif mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, bila perlu penyuluhan diperluas sehingga mencakup tenaga kerja agar mereka tahu dan paham benar akan peran dan fungsi Jamsostek. Hal ini dilakukan untuk melindungi peserta program atas jaminan kecelakaan kerja sehingga hak jaminan yang diberikan peserta dapat dipenuhi.
2. Diperlukan adanya badan atau lembaga khusus yang mengurus masalah tenaga kerja yang mengikuti program Jamsostek pada PT. Jamsostek sebagai tempat pengaduan dan mencari perlindungan.
3. Hendaknya dalam pelayanan pembayaran dan pengajuan klaim dipermudah dan dipercepat agar peserta yang mengalami kecelakaan kerja bisa cepat menutup penghasilan yang hilang.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penyusun berikan sehubungan dengan hasil penelitian dan pembahasan tentang pemberian perlindungan hukum bagi peserta dalam penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Surakarta.

